



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

### **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2022**

**Kode Organisasi : 4.01.15.00**

**Nama SKPD : KECAMATAN GAMBUT**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.



Gambut, 31 Januari 2023  
Camat Gambut

Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.  
NIP. 19801125 200012 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. Maksud dan Tujuan .....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	6
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	9
D. Isu Strategis .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran .....	27
C. Realisasi Anggaran.....	34
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021..	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan.....	38
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>39</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup berhasil** dengan capaian kinerja **94,58 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia

perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Gambut berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Gambut adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

SumberDana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 5.698.969.157,00	100%

## Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4.11      Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4.11.03      Kecamatan Gambut					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.698.969.157,00	4.660.506.398,00	81,78	5.186.559.310,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.641.666.157,00	4.605.844.148,00	81,64	4.133.322.790,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.507.447.601,00	3.529.887.694,00	78,31	3.557.074.851,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.134.218.556,00	1.075.956.454,00	94,86	776.247.939,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	57.303.000,00	54.662.250,00	95,39	853.236.520,00
5.2.2	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	57.303.000,00	54.662.250,00	95,39	163.060.220,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	690.166.300,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.698.969.157,00)	(4.660.506.398,00)	81,78	(5.186.559.310,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(5.698.969.157,00)	(4.660.506.398,00)	81,78	(5.186.559.310,00)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN**

#### **A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gambut
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

---

#### **B.1 KEDUDUKAN:**

Kecamatan Gambut merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

---

#### **B.2 TUGAS:**

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



---

### B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

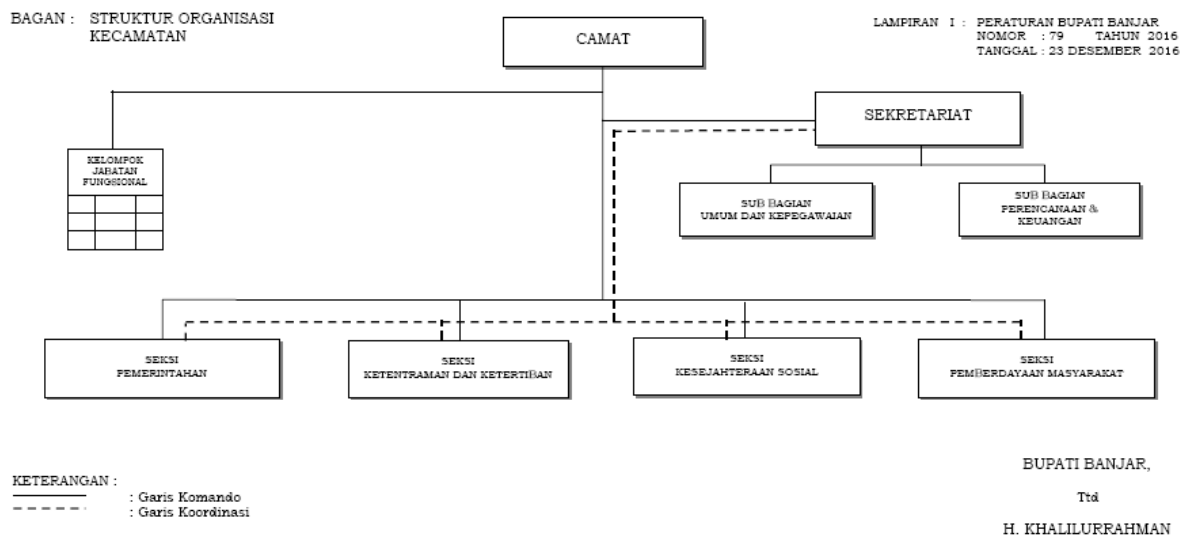
Susunan Organisasi Kecamatan Gambut terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

**Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar**



### C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Gambut yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Gambut masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Kecamatan Gambut

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.

			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
--	--	--	---

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.Gambut Thn.2021-2026

#### D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Gambut secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Gambut sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis

Kecamatan Gambut adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

#### **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Gambut mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	<p>(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <p>Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketertarikan dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>Rencana Range Nilai :</p> <p>50-59 (Sangat Rendah)</p> <p>60-69 (Rendah)</p> <p>70-79 (Sedang)</p> <p>80-89 (Baik/Tinggi)</p> <p>90-100 (Sangat Baik/ Sangat Tinggi)</p>	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : SK IKU Kec. Gambut

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN GAMBUT  
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pagu Anggaran									5.698.969.157	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai					70	-	Camat
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		persen	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	Indek	55	4.956.320.357	Sekretaris Camat
			Persen	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100%	3,405,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	270,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	375,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	75,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	450,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	750,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	750,000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	730,000	Kasubbag Perenkeu
			Persen	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.462.447.601	Kasubbag Perenkeu
			bulan	14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	4.423.027.602	Kasubbag Perenkeu



			laporan	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	38.820,000	Kasubbag Perenkeu
			Persen	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	27.295,000	Kasubbag Perenkeu
			laporan	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	100,000	Kasubbag Perenkeu
			laporan	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	195,000	Kasubbag Perenkeu
			Orang	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	27,000,000	Kasubbag Perenkeu
			persen	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	700,000	Kasubbag Umpeg
			laporan	1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	700,000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	103.609.500	Kasubbag Umpeg
			jenis	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.998.300	Kasubbag Umpeg
			jenis	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.682.000	Kasubbag Umpeg
			bulan	12	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Paket	1	17.998.200	Kasubbag Umpeg
			bulan	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	Kasubbag Umpeg
			orang	200	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket	1	3.000.000	Kasubbag Umpeg
			bulan	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	72.130,000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	48.883.000	Kasubbag Umpeg
			jenis	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	Unit	1	7.405.000	Kasubbag Umpeg
			unit	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	41,478,000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	224,055,256	Kasubbag Umpeg
			bulan	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,450,000	Kasubbag Umpeg
			bulan	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.015.256	Kasubbag Umpeg

			bulan	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	157.580.000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%	100%	85.725.000	Kasubbag Umpeg
			unit	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	62.716.000	Kasubbag Umpeg
			jenis	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	11,010,000	Kasubbag Umpeg
			unit	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	Kasubbag Umpeg
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan		persen	84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	100%	38,143.000	Kasi Kessos
			persen	84	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	18,980.000	Kasi Kessos
			laporan	12	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	18,980.000	Kasi Kessos
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100%	100%	17,197.800	Kasi Kessos
			kegiatan	6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	6	17,197.800	Kasi Kessos
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	76,985,000	Kasi PM
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100%		Kasi PM
			kegiatan	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan	2	9,275.000	Kasi PM
			kegiatan	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	67,710.000	Kasi PM

4	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100%	14,940,000	Kasi Trantib
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%		Kasi Trantib
			kegiatan	4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	5,000,000	Kasi Trantib
			kegiatan	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	4,970,000	Kasi Trantib
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%		Kasi Trantib
			kegiatan	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	4,970,000	Kasi Trantib
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		kegiatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	96,010,000	Kasi PEM
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%		Kasi PEM
			kegiatan	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	35,000.000	Kasi PEM
			kegiatan	2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	61,010,000	Kasi PEM
6	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	26,570.000	Kasi PEM

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100%		Kasi PEM
			kegiatan	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	4,000,000	Kasi PEM
			kegiatan	2	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	4,970,000	Kasi PEM
			kegiatan	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1,995,000	Kasi PEM
			kegiatan	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	2,985,000	Kasi PEM
			kegiatan	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	2,995,000	Kasi PEM
			kegiatan	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas	Dokumen	1	4,985,000	Kasi PEM
			Kegiatan	1	Fasilitasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	1	4,640,000	Kasi PEM

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja PerubahanThn.2022 Kec.Gambut

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gambut tahun 2022 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggungjawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Gambut (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawahtanggungjawab Sekretariat dan Seksi (eselon IIIb dan IV)

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2022**

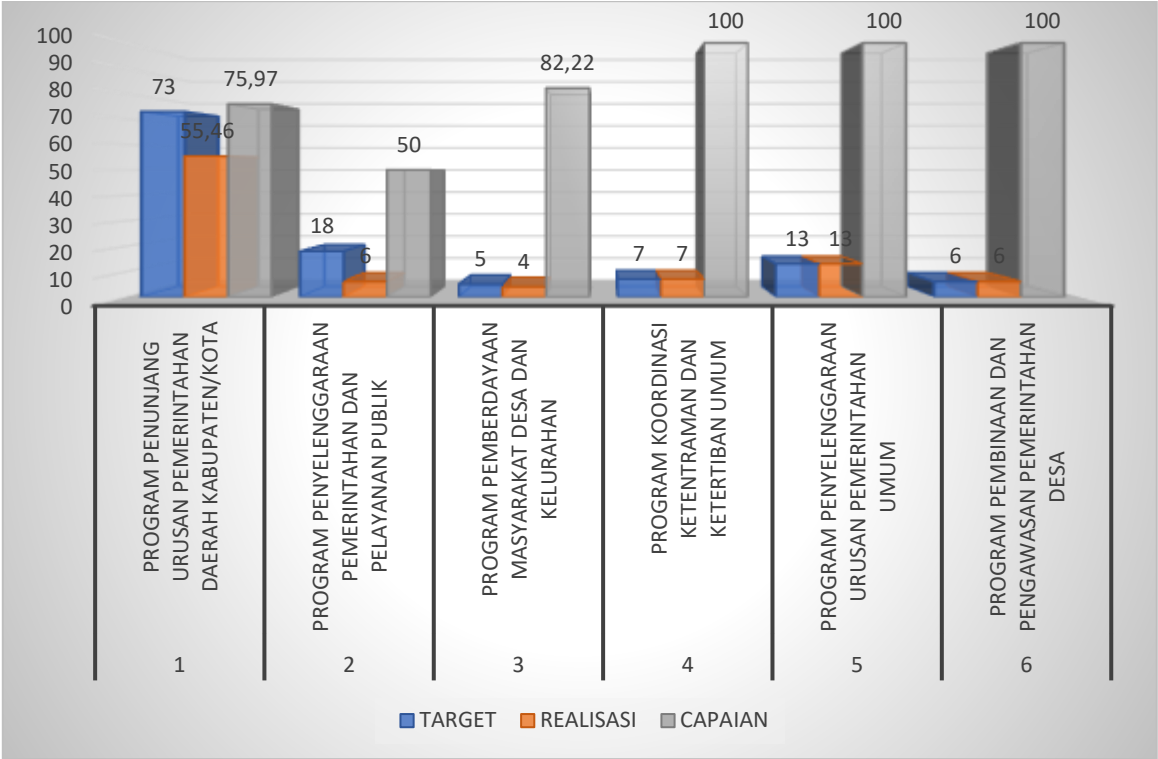
NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
				SATUAN	TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan		Nilai	70.00	76.82	109.74	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut		Indek	50.00	22.60	45.20	Kurang Berhasil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	16	16	100.00	Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen	7	7	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	3	3	100.00	Berhasil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	2	2	100.00	Berhasil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	17	17	100.00	Berhasil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi / Rencana X 100 %	bulan	14	14	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		laporan	2	2	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	1	1	100.00	Berhasil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	6	6	100.00	Berhasil
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	Laporan	1	1	100.00	Berhasil
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	2	2	100.00	Berhasil
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		orang	3	3	100.00	Berhasil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	1	1	100.00	Berhasil

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi / Rencana X 100 %	laporan	1	1	100.00	Berhasil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	252	252	100.00	Berhasil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	jenis	5	5	100.00	Berhasil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		jenis	10	10	100.00	Berhasil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jenis	25	25	100.00	berhasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu		orang	200	200	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	5	5	100.00	Berhasil
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	2	2	100.00	Berhasil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	3	3	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	36	36	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi / Rencana X 100 %	bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	15	15	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	7	7	100.00	Berhasil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		jenis	5	5	100.00	Berhasil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		gedung	3	3	100.00	Berhasil
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	100% persen	18	18	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100% persen	12	12	100.00	Berhasil
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	laporan	12	12	100.00	Berhasil



	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		100%	6	6	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	kegiatan	6	6	100.00	Berhasil
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100%	100% persen	7	6	85.71	Cukup Berhasil
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		100% Persen	7	6	85,71	Cukup Berhasil
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	kegiatan	2	2	100.00	Berhasil
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	kegiatan	5	4	80.00	Cukup Berhasil
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		100% persen	7	7	100.00	Berhasil
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	100% persen	5	5	100.00	Berhasil
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll	kegiatan	4	4	100.00	Berhasil
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		kegiatan	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		100%	2	2	100.00	Berhasil
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah KegiatanTrantibumlinmas yang terlaksana	kegiatan	2	2	100.00	Berhasil
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	3	3	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100%	100%	3	3	100	Berhasil

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan)	kegiatan	1	1	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		kegiatan	2	2	100.00	Berhasil
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			7	7	100.00	Berhasil
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	100% persen	7	7	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Menunjuukan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjaringan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangan dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjaringan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB	dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		dokumen	2	2	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							92	Sangat Tinggi



Sumber : Renstra Perubahan Kec.Gambut Thn.2021-2026

Rata-rata capaian kinerja merupakan rata-rata keseluruhan capaian kinerja.  
Hasil rata-rata capaian kinerja diberikan predikat sebagai hasil kinerja perangkat daerah.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Orange
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan Target Kinerja 70,00 % dan Realiasi Kinerja 76,82 % dengan Capaian 109,74 %. Indikator kinerja pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah **Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan** dengan target 50,00 % dan Realisasi Target 22,60 dengan capaian sebesar 45.20%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.405.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 3.255.000,- (95,59%). Indikator kinerja pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD dengan target 100 % dengan capaian sebesar 94,96 % dan dapat dikatakan Cukup Berhasil.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Target kinerja pada sub kegiatan *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* dengan Target Kinerja 7 Dokumen dan Realisasi Kinerja 7 Dokumen dengan capaian 100%

Adapun realisasi sub kegiatan *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak.

**2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Target kinerja pada sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

**3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Target kinerja pada sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

**4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Target kinerja pada sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

#### **5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Target kinerja pada sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

#### **6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Target kinerja pada sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

#### **7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Target kinerja pada sub *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 38.143.000,-. Indikator kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah ***Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana*** dengan target 100 % dan realisasi Kinerja 6 Kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan sebesar Rp. 18.980.000,-.. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan target 100 % dan capaian sebesar 100 % dan dapat dikatakan Berhasil.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**

Target kinerja pada sub *Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan* dengan Target Kinerja 12 Laporan dan Realisasi Kinerja 12 Laporan atau capaian 100 %

Adapun realisasi sub *Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan* adalah Pelayanan PATEN.

**b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan sebesar Rp. 1.966.000,-.. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan target 100 % dan capaian sebesar 100 % dan dapat dikatakan Berhasil.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

**2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Target kinerja pada sub *Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

dengan Target Kinerja 12 Laporan dan Realisasi Kinerja 12 Laporan atau capaian 100 %

Adapun realisasi sub *Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* adalah Pelayanan PATEN.

**c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 17.197.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.537.500,- (90,34%). Indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat adalah Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan target 100 Persen dengan Realisasi Kinerja 6 Kegiatan dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaran Urusan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**

Target kinerja pada sub *Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan* adalah 6 Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan *Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan* adalah:

1. Kegiatan Kecamatan Sehat
2. Rakor Puskessos
3. Rakor Koordinasi BPNT
4. Rakor Kegiatan Posyandu Remaja
5. Rakor Koordinasi Rembuk Stunting

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Pagu murni anggaran program sebesar Rp. 55.765.000,- kemudian menjadi Rp. 76.985.000,- karena adanya *refocussing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.935.000,- (77,85%). Indikator kinerja pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah dengan target 100 persen dan realisasi target sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 85,20 Persen. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 55.765.000,- kemudian menjadi Rp. 76.985.000,- karena adanya *refocussing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.935.000,-



(77,85%). Indikator kinerja pada kegiatan adalah Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 85,20 Persen.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 2 (dua) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan atau capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah :

1. Pra Musrenbang
2. Musrenbang

**2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah Fasilitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan target 3 (tiga) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan capaian 75,65%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Laporan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMDES
- Laporan Kegiatan Pembinaan PKK

**4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Pagu anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 14.940.000,- Indikator kinerja pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 persen.dan dapat dikatakan Berhasil. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**



Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 9.970.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

***1. Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan***

Target kinerja pada Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target awal 2 (dua) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah:

- Kegiatan Rakor Linmas Desa
- Kegiatan Posko Pengamanan Pilkades

***2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat***

Target kinerja pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target 1 (satu) Kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah:

- Kegiatan FKUB

**b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 4.970.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah

Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Target kinerja pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target awal 1 (satu) kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pagu murni anggaran program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 99.660.000,- kemudian menjadi Rp. 96.010.000,-. Karena adanya *refocussing* anggaran. Indikator kinerja pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 96.010.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,**

***Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia***

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 35.000.000,- dan realisasi Rp. 35.000.000,-

Target kinerja pada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target 1 (satu) kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) jenis laporan atau capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

***2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal***

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 64.660.000,- kemudian menjadi Rp. 61.010.000,-dikarenakan adanya *refocussing* anggaran dan realisasi Rp. 61.010.000

Target kinerja pada sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal adalah Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal target 2 (dua) kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten
- Kegiatan Keagamaan/Hari-hari Besar Agama

**A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	-	Persentase	Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi	
2	Persentase Pencapaian Target PAD	-	Persentase								
3	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa	-	Persentase								
4	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan	-	Persentase								
5	Persentase Ketepatan Waktu Pemilihan Pembakal	-	Persentase								
6	Penyelesaian Tugas Umum Pemerintahan	-	Persentase								
7	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	.....	.....	52,85	75,50%	63,27	90,38%		
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang	Indek	81,97	91,07%	83,13	92,36%	81,39	89,43%		
9	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	-	-	-	-	-	-	76,82	109.74%

		<p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <p>Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/ Sangat Tinggi)</p>									
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen	10	100	10	97,78	10	100	90.83	98.33
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	kegiatan	6	100	5	83,33	5	100	6	70.00
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100%	kegiatan	6	100	4	100	7	100	4	82.22

13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	kegiatan	2	100	4	100	3	100	7	100.00
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100%	kegiatan	3	100	5	83,33	1	100	13	100.00
15	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	kegiatan							7	100.00

Sumber : Renstra Perubahan Kec. Gambut Thn.2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dan 2018 Kecamatan Gambut menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Gambut menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dan pada Renstra Perubahan pada tahun 2021 Kecamatan Gambut menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Capaian kinerja Sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 109,74 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 89,43% maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian mencapai target tahun 2022 yang sudah di tentukan.

Untuk capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 95,89 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja yaitu 100%, capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 70% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 85,20% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, Capaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100 % , Capaian indikator kinerja Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, artinya semua indikator kinerja kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi semua sesuai dengan target kegiatan.

Tabel 3.4  
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja  
Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2022-2026

SKPD : KECAMATAN GAMBUT

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terselenggara nya reformasi dalam pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90.50%	1.389.283. 000	90.60 %	1.461.500. 000	90.70%	1.487.84 1.400	90.80%	1.487.84 6.000	90.90%	1.500.73 9.460	90.90%	7.33 768 60	



											0000						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			Nilai Evaluasi Kecamatan		75		77		79		82		85		86	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut		100%	407.283.000	100%	437.500.000	100%	446.100.000	100%	451.846.000	100%	454.739.460	100%	2.154.468.000

		Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersediany a dokumen pengangga ran, perencana an dan evaluasi kinerja SKPD		100%	1.300.000	100%	1.525.000	100%	1 . 9 0 0 . 0 0 0 0	100%	2.250.000	100%	2.350.000	100%	9.3 0
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		6 Dokume n	250.000	6 Dokum en	250.000	6 Dokumen	3 0 0 . 0 0 0 0	6 Dokume n	350.000	6 Dokume n	350.000	30 Dokumen	1.5 0
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1 Dokume n	200.000	1 Dokum en	250.000	1 Dokumen	3 0 0 . 0 0 0 0	1 Dokume n	350.000	1 Dokume n	350.000	5 Dokumen	1.4 0
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1 Dokume n	50.000	1 Dokum en	75.000	1 Dokumen	1 0 0 . 0 0 0 0	1 Dokume n	150.000	1 Dokume n	200.000	5 Dokumen	575
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun		1 Dokume n	250.000	1 Dokum en	250.000	1 Dokumen	3 0 0 . 0 0 0 0	1 Dokume n	350.000	1 Dokume n	350.000	5 Dokumen	1.5 0

											00						
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	300000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	350.000	5 Dokumen	1.400
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		4 Dokumen	200.000	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	300000	4 Dokumen	350.000	4 Dokumen	350.000	20 Dokumen	1.400
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen	150.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	300000	2 Dokumen	350.000	2 Dokumen	400.000	10 Dokumen	1.400
		<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhi nya administra si keuangan SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>49.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>61.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>6150000</b>	<b>100%</b>	<b>61.550.000</b>	<b>100%</b>	<b>61.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>295.500.000</b>

											00						
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan		36 ASN		36 ASN		36 ASN		36 ASN		36 ASN		405 ASN	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 ASN	49.200.000	6 ASN	61.200.000	6 ASN	61.200.000	6 ASN	61.200.000	6 ASN	61.200.000	55 ASN	294.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	400.000	5 Dokumen	1.500
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100%	27.500.000	100%	27.650.000	100%	27.700.000	100%	27.750.000	100%	27.800.000	100%	138.000

		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		4 Laporan	300.000	4 Lapora n	400.000	4 Laporan	4 0 0 . 0 0 0	4 Laporan	400.000	4 Laporan	400.000	20 Laporan	1.9 0
			2	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		1 Laporan	200.000	1 Lapora n	250.000	1 Laporan	3 0 0 . 0 0 0	1 Laporan	350.000	1 Laporan	400.000	5 Laporan	1.5 0
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD		3 Orang	27.000.000	3 Orang	27.000.000	3 Orang	2 7 . 0 0 0 . 0 0 0	3 Orang	27.000.000	3 Orang	27.000.000	40 Orang	135 .0
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhi nya administra si kepegawai an SKPD		100%	150.000	100%	10.200.000	100%	3 0 0 . 0 0 0	100%	350.000	100%	400.000	100%	11.4 .0
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut							-					20 Orang	10.0 .0

		a		Kelengkapan nya													
		Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun		1 Laporan	150.000	1 Lapora n	200.000	1 Laporan	3 0 0 . 0 0 0	1 Laporan	350.000	1 Laporan	400.000	5 Laporan	1.4 0
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah ASN yang faham tentang materi Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan yang terlaksana													
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhi nya administra si Kecamata n		100%	45.553.000	100%	56.045.000	100%	6 3 . 2 0 0 . 0 0 0	100%	67.696.000	100%	69.839.460	100%	302. 3.4

		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor		5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2 .0 00 .0 00 0	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	10 Jenis	9.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25 Jenis	2.000.000	25 Jenis	5.000.000	25 Jenis	5 .0 00 .0 00 0	25 Jenis	5.000.000	25 Jenis	5.000.000	125 Jenis	22.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		10 Jenis	1.000.000	10 Jenis	1.500.000	10 Jenis	2 .0 00 .0 00 0	10 Jenis	2.500.000	10 Jenis	2.500.000	50 Jenis	9.500.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		4 Kegiatan	8.053.000	4 Kegiatan	8.045.000	4 Kegiatan	9 .2 00 .0 0	4 Kegiatan	9.196.000	4 Kegiatan	9.839.460	20 Kegiatan	44.340.000

											000						
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksan ya pencetak an dan Pengganda an		3 Jenis	1.500.000	3 Jenis	2.000.000	3 Jenis	25000	3 Jenis	3.000.000	3 Jenis	3.500.000	15 Jenis	12.500
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang terpasilitasi		40 Orang	2.000.000	50 Orang	2.500.000	50 Orang	25000	60 Orang	3.000.000	70 Orang	3.500.000	600 Orang	13.500
		Sub Kegiatan : Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksan ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar dan dalam daerah		1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	40000	1 Tahun	43.000.000	1 Tahun	43.500.000	5 Tahun	191.000



		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	19.500.000	100%	15.000.000	100%	18000000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	92.50
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli		-										3 Unit	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000		3000000	5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	10.000.000	20 Jenis	33.00
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		4 Jenis	14.500.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	15000000	1 Jenis	10.000.000	1 Jenis	10.000.000	5 Jenis	59.50

											0						
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersediany a Jasa Penunjang Pemerinta h Daerah		100%	214.500.000	100%	215.250.000	100%	214.250.000 0	100%	214.250.000 0	100%	214.250.000 0	100%	1.075.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000	60 Bulan	11.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, Air bersih dan internet		12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	54.750.000	12 Bulan	54.750.000	12 Bulan	54.750.000	12 Bulan	54.750.000	60 Bulan	276.000.000

		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		7 Orang	157.500.000	17 Orang	157.500.000	17 Orang	157.500.000	17 Orang	157.500.000	17 Orang	157.500.000	83 Orang	787.000
		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>		100%	49.380.000	100%	50.380.000	100%	50.380.000	100%	58.000.000	100%	58.500.000	100%	273.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang terpelihara		7 Unit	34.380.000	7 Unit	34.380.000	7 Unit	34.380.000	7 Unit	40.000.000	7 Unit	40.000.000	35 Unit	188.000
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggar anya Pemeliharaa n Peralatan		3 Jenis	3.000.000	3 Jenis	4.000.000	3 Jenis	4.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.500.000	15 Jenis	24.500

				dan Mesin Lainnya							0000						
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara		3 Buah	12.000.000	4 Buah	12.000.000	4 Buah	12000000	4 Buah	12.000.000	4 Buah	12.000.000	20 Buah	60.000.000
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Presentase Nilai SKM		<b>90.56%</b>	<b>37.500.000</b>	<b>90.60%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90.70%</b>	<b>52000000</b>	<b>90.80%</b>	<b>56.000.000</b>	<b>90.90%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>90.90%</b>	<b>256.000.000</b>
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di		Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP		<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>17500000</b>	<b>100%</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>79.000.000</b>

		Kecamatan															
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan		13 Jenis	7.500.000	13 Jenis	15.000.000	13 Jenis	17.500.000	13 Jenis	19.000.000	13 Jenis	20.000.000	65 Jenis	79.000.000
		Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana		100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	37.000.000	100%	40.000.000	100%	177.000.000
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan		4 Kegiatan	30.000.000	4 Kegiatan	35.000.000	4 Kegiatan	35.000.000	4 Kegiatan	37.000.000	4 Kegiatan	40.000.000	20 Kegiatan	177.000.000

		dilimpahkan									00						
		<b>PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>PERSENT ASE TERLAKS ANANYA PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN</b>		<b>100%</b>	<b>846.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>846.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>846.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>846.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>846.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.250.000</b>
		<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Koordinasi Pemberday aan Desa yang Terlaksana</b>		<b>75 Kegiata n</b>	<b>46.500.000</b>	<b>75 Kegiat an</b>	<b>46.500.000</b>	<b>75 Kegiatan</b>	<b>46.500.000</b>	<b>75 Kegiata n</b>	<b>46.500.000</b>	<b>75 Kegiata n</b>	<b>46.500.000</b>	<b>375 Kegiatan</b>	<b>232.000</b>
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	1	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu		14 Desa/Kel urahan	3.000.000	14 Desa/K eluraha n	3.000.000	14 Desa/Kelurahan	3.000.000	14 Desa/Kel urahan	3.000.000	14 Desa/Kel urahan	3.000.000	70 Desa/Keluraha n	15.000.000

		Perencanaan Pembangunan di Desa									000						
			2	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu		2 Kegiatan	10.000.000	2 Kegiatan	10.000.000	2 Kegiatan	10000	2 Kegiatan	10.000.000	2 Kegiatan	10.000.000	10 Kegiatan	50000
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina		14 Desa & Kegiatan	14.000.000	14 Desa & Kegiatan	14.000.000	14 Desa & Kegiatan	14000	14 Desa & Kegiatan	14.000.000	14 Desa & Kegiatan	14.000.000	70 Desa & Kegiatan	70000
			2	Jumlah Fasilitas Jambore dan Lomba PPK yang diikuti		2 Kegiatan	12.000.000	2 Kegiatan	12.000.000	2 Kegiatan	12000	2 Kegiatan	12.000.000	2 Kegiatan	12.000.000	10 Kegiatan	60000

											0						
			3	Jumlah Perencanaan Pembanguna n Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi		12 Desa	4.500.000	12 Desa	4.500.000	12 Desa	4 . 5 0 0 . 0 0 0	12 Desa	4.500.000	12 Desa	4.500.000	60 Desa	22.5 .0
			4	Jumlah Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat yang dilaksanakan		3 Kegiatan	3.000.000	3 Kegiata n	3.000.000	3 Kegiatan	3 . 0 0 0 . 0 0 0	3 Kegiatan	3.000.000	3 Kegiatan	3.000.000	15 Kegiatan	15.0 .0
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Koordinasi Pemberday aan Kelurahan yang Terlaksana		2 Kelurah an	800.000.000	2 Kelura han	800.000.000	2 Kelurahan	8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0	2 Kelurah an	800.000.00 0	2 Kelurah an	800.000.00 0	10 Kelurahan	4.0 000.



		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Musrenbang Kelurahan yang tepat waktu		2 Keluraha n	10.000.000	2 Kelura han	10.000.000	2 Kelurahan	1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0	2 Keluraha n	10.000.000	2 Keluraha n	10.000.000	10 Kelurahan	50.0 .0
		Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terlaksana		2 Keluraha n	-	2 Kelura han	0	2 Kelurahan	0	2 Keluraha n	0	2 Keluraha n	0	2 Kelurahan	
			2	Jumlah Pemberdaya an Kelurahan yang Terlaksana		2 Keluraha n	-	2 Kelura han	0	2 Kelurahan	0	2 Keluraha n	0	2 Keluraha n	0	2 Kelurahan	
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Peningkatan Saranan Prasarana yang Terlaksana		2 Keluraha n		2 Kelura han	0	2 Kelurahan	0	2 Keluraha n	0	2 Keluraha n	0	2 Kelurahan	
			2	Jumlah Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		2 Keluraha n	783.000.000	2 Kelura han	783.000.000	2 Kelurahan	7 8 3 . 0 0 0 0	2 Keluraha n	783.000.00 0	2 Keluraha n	783.000.00 0	10 Kelurahan	3.9 000.

											. 0 0 0						
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang terlaksana		1 Kegiatan	7.000.000	1 Kegiatan	7.000.000	1 Kegiatan	7. 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Kegiatan	7.000.000	1 Kegiatan	7.000.000	7 Kegiatan	35.0 .0
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumli nmas	Fasilitasi dan koordina si Penanga nan Tramtibu mlinmas pada Kecamat an tsb	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>4 9 .8 0 0 0 0 0 0</b>	<b>100%</b>	<b>33.500.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>170. 0.0</b>
		<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Sub Kegiatann Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketentrama n dan Ketertiban Umum yang</b>		<b>6 Kegiatan</b>	10.000.000	<b>6 Kegiatan</b>	15.000.000	<b>2 Kegiatan</b>	3 0 .0 0 0 0 0 0	<b>6 Kegiatan</b>	16.000.000	<b>6 Kegiatan</b>	20.000.000	<b>30 Kegiatan</b>	<b>91.0 .0</b>

				terpasilitasi							0						
		Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Kegiatan	5.000.000	4 Kegiatan	7.500.000	1 Kegiatan	15000000	4 Kegiatan	8.000.000	4 Kegiatan	10.000.000	17 Kegiatan	45.500.000
		Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Kegiatan	5.000.000	2 Kegiatan	7.500.000	1 Kegiatan	15000000	2 Kegiatan	8.000.000	2 Kegiatan	10.000.000	9 Kegiatan	45.500.000
		<b>Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</b>		Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan		<b>13 Kegiatan</b>	10.000.000	<b>13 Kegiatan</b>	17.500.000	<b>1 Kegiatan</b>	1980000	<b>13 Kegiatan</b>	17.500.000	<b>13 Kegiatan</b>	15.000.000	<b>65 Kegiatan</b>	<b>79.800.000</b>

		Peraturan Kepala Daerah		Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi							. 0 0 0						
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sine rgi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi		13 Kegiatan	10.000.000	13 Kegiata n	17.500.000	13 Kegiatan	1 9 . 8 0 0 . 0 0 0	13 Kegiatan	17.500.000	13 Kegiatan	15.000.000	65 Kegiatan	79.8 .0
		<b>PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM</b>		Angka stabilitas keamanan lokal	Gangguan kemanan an yang terkait dengan konflik SARA dan Ideologi	0%	40.000.000	0%	42.500.000	0%	4 3 . 0 0 0 . 0	0%	45.000.00 0	0%	47.000.00 0	0%	217. 0.0

					Pancasila yang bersifat massal						00						
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi		4 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	42.500.000	3 Kegiatan	43000000	4 Kegiatan	45.000.000	4 Kegiatan	47.000.000	18 Kegiatan	217.000.000
		Sub Kegiatan ; Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan		1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	12.500.000	1 Kegiatan	13000000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	17.000.000	5 Kegiatan	67.500.000

		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia															
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		3 Kegiatan	30.000.000	2 Kegiatan	30.000.000	2 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	13 Kegiatan	150.000.000
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	% desa yang terbina dibanding jumlah desa yang ada di	<b>100%</b>	<b>38.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>52.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>52.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>57.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>256.000.000</b>

					Kecamat an						. 0 0 0						
		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang Terlaksana		14 Kegiatan	38.000.000	14 Kegiata n	52.500.000	14 Kegiatan	5 3 . 5 0 0 0 . 0 0 0	14 Kegiatan	55.000.000	14 Kegiatan	57.500.000	70 Kegiatan	256. 0.0
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintah an Desa yang Terfasilitasi		12 Desa	9.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	1 0 . 0 0 0 . 0 0 0	12 Desa	10.000.000	12 Desa	11.000.000	60 Desa	50.0 .0
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa yang Terfasilitasi		12 Desa	8.000.000	12 Desa	12.000.000	12 Desa	1 0 . 0 0 0 . 0 0 0	12 Desa	10.000.000	12 Desa	11.000.000	60 Desa	51.0 .0

											0						
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang Terfasilitasi		4 Kegiatan	12.000.000	4 Kegiatan	16.500.000	4 Kegiatan	14000000	4 Kegiatan	15.000.000	4 Kegiatan	16.000.000	20 Kegiatan	73.500.000
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi			-		0	3 Kegiatan	4500000	3 Kegiatan	4.500.000	3 Kegiatan	6.000.000	6 Kegiatan	15.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi		1 Kegiatan		3.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	7000000	1 Kegiatan	5.500.000	1 Kegiatan	5.000.000	3 Kegiatan	25.500.000



		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan		4 Kegiatan	6.000.000	4 Kegiatan	9.000.000	4 Kegiatan	8 . 0 0 0 . 0 0 0 0	4 Kegiatan	10.000.000	4 Kegiatan	8.500.000	20 Kegiatan	41.5 .0
1.389.283 .000	1.491.400.0 00		1.487.846.000										1.500.739 .460		7.330.768 .460		



### A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2021 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2022, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Gambut selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

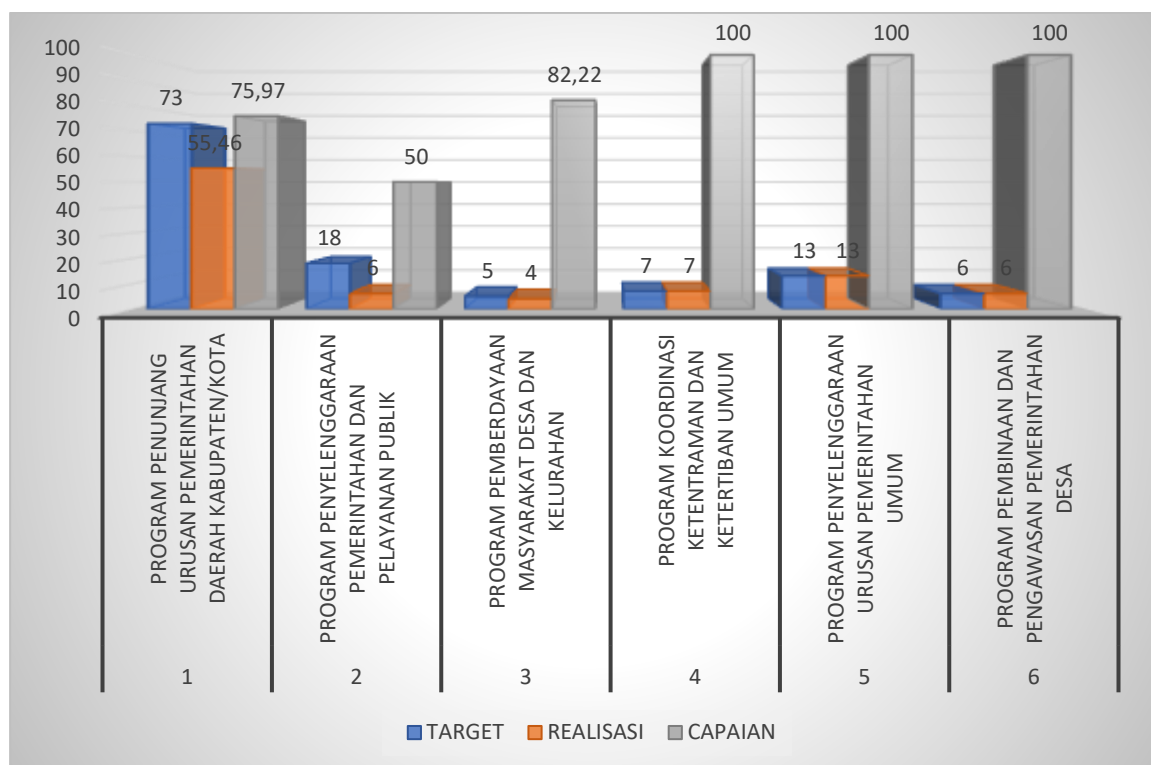
Tabel 3.4.1  
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
				SATUAN	TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan		Nilai	70.00	76,82	109.74	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut		Inde	70.00	22.60	32.28	Kurang Berhasil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	16	16	100.00	Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen	7	7	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	3	3	100.00	Berhasil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	2	2	100.00	Berhasil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	15	15	100.00	Berhasil

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi / Rencana X 100 %	bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		laporan	2	2	100.00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	1	1	100.00	Berhasil
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% Persen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	Laporan	1	1	100.00	Berhasil
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	4	4	100.00	Berhasil
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		orang	3	3	100.00	Berhasil
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% persen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi / Rencana X 100 %	laporan	1	1	100.00	Berhasil
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% persen</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	jenis	5	5	100.00	Berhasil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		jenis	10	10	100.00	Berhasil
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik		jenis	25	25	100.00	Berhasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		orang	200	200	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% persen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	2	2	100.00	Berhasil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	3	3	100.00	Berhasil
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% persen</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi / Rencana X 100 %	bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		bulan	12	12	100.00	Berhasil
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</b>	<b>Realisasi / Rencana X 100 %</b>	<b>100% persen</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>	<b>Berhasil</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	7	7	100.00	Berhasil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		jenis	4	4	100.00	Berhasil

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		gedung	3	3	100.00	Berhasil
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	100% persen	18	18	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100% persen	12	12	-	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	laporan	12	12	-	Berhasil
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		100%	6	6	100.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	kegiatan	6	6	100.00	Berhasil
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dircanakan dikali 100%	100% persen	5	4	82.22	Cukup Berhasil
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		100% Persen	5	4	80.00	Berhasil
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	kegiatan	2	2	100.00	Berhasil
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	kegiatan	3	2	66.67	Berhasil
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		100% persen	7	7	100.00	Berhasil
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	100% persen	5	5	100.00	Berhasil
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertindaknya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll	kegiatan	4	4	100.00	Berhasil
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		kegiatan	1	1	100.00	Berhasil

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		100%	2	2	100.00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah KegiatanTrantibumlinmas yang terlaksana	kegiatan	2	2	100.00	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		100%	13	13	100.00	Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100%	100%	13	13	100	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan)	kegiatan	1	1	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		kegiatan	2	2	100.00	Berhasil
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		kegiatan	10	10	100	Berhasil
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>			6	6	100.00	Berhasil
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	100% persen	7	7	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Menunjuukan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangam dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjarangan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB	dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		dokumen	1	1	100.00	Berhasil
	Fasilitasi Penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa						
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan		dokumen	1	1	100.00	Berhasil



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Gambut Thn.2022

Berdasarkan data pada tabel 3.4.1 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 90,00 masih belum bisa mencapai target akhir periode renstra yakni 90,50 di tahun 2022. Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 dengan nilai 63,27 (Baik).

Tabel 3.4.2  
Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
			(≥ 100 %)		
1	2	3	4	5	6 (100%-Kol 5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	109.74	81.78	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	22.60	81.78	-59.18
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	97.96	98.36	(97.36)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.71	98.89	-97.89
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00	76.00	-75.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00	96.67	-95.67
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100.00	99.33	-98.33
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100.00	99.00	-98.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00	97.78	-96.78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	100.00	-99.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.56	81.52	(80.52)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86.67	81.24	-80.24
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	100.00	-99.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang	90.00	1.00	-



		Tersusun			
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00		1
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.00		1.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00		1.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</b>	<b>53.33</b>	<b>83.18</b>	<b>(82.18)</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.00	100.00	-99.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>94.80</b>	<b>(93.80)</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	99.70	-98.70
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.00	99.76	-98.76
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	100.00	99.99	-98.99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00	83.84	-82.84
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00	99.99	-98.99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	93.65	-92.65
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>98.99</b>	<b>(97.99)</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel	100.00	98.99	-97.99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00	98.99	-97.99
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>90.76</b>	<b>(89.76)</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	100.00	-99.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	91.03	-90.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00	90.71	-89.71
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</b>	<b>133.33</b>	<b>99.09</b>	<b>(98.09)</b>

	Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00	99.01	-98.01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	98.31	-97.31
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00	99.76	-98.76
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana</b>	<b>75.00</b>	<b>90.53</b>	<b>(89.53)</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.00	-	1.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.00	100.00	-99.00
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>83.33</b>	<b>99.92</b>	<b>(98.92)</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100.00	99.79	-98.79
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.67	99.96	-98.96
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>(99.00)</b>

		<b>masyarakat di kecamatan</b>			
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.00	100.00	-99.00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.00	100.00	-99.00
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi</b>			
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.00	100.00	-99.00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>(99.00)</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi</b>		<b>100.00</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.00	100.00	-99.00

	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100.00	100.00	-99.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100	-99.00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>(99.00)</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</b>			
	Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi tata pemerintahan Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan batas Desa	100.00	100.00	-99.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100.00	100.00	-99.00

#### A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DAN TARGET NASIONAL

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022  
Target Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6


Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gambut dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

#### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,

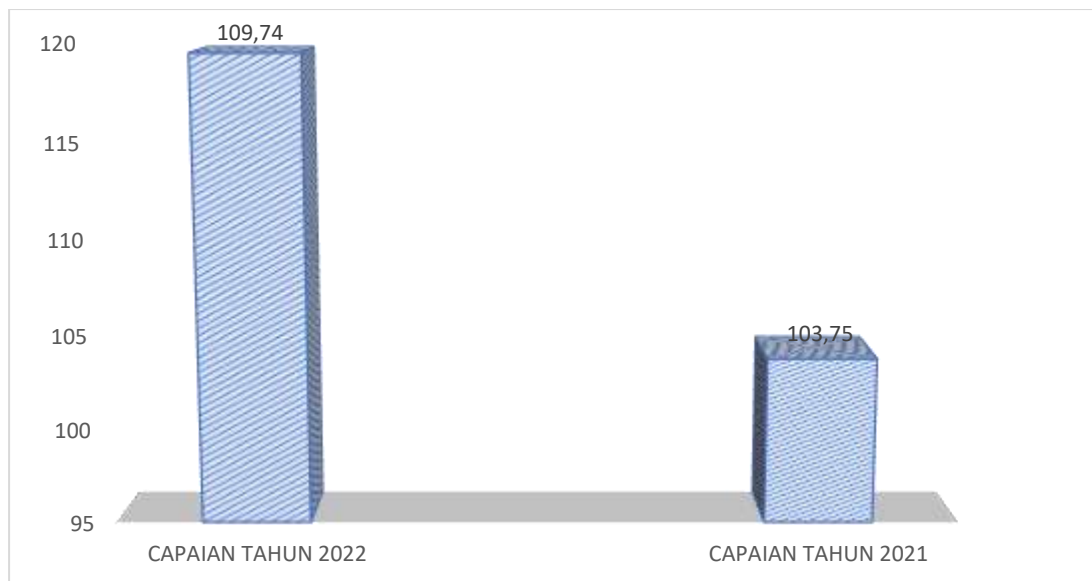
Pada tahun 2022 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Indikator Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Evaluasi kinerja Kecamatan	70	76.82	109.74

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Thn.2022 Kec.Gambut



Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 99,44 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 91,35 % maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja tetapi nilai tersebut masih belum mencapai target tahun 2022 yang sudah di tentukan.

#### **Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :**

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gambut realisasi sebesar 90,00 dari target 90,50 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 99,44% dengan kategori **(Berhasil)** di bandingkan dengan tahun 2021 dimana realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,39 dari target 91 maka di peroleh capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 89,43 % artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi peningkatan capaian kinerja tetapi capaian kinerja sasaran dan program tahun 2022 tersebut belum mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah di tentukan. Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sebesar 63,27 (Baik).

Penghambat tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarkat diketahui dari hasil survey yang dilakukan terhadap 235 responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Gambut pada bulan Januari sampai

dengan Desember 2021, dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah produk spesifikasi jenis pelayanan ( 3,01 )

Tidak terlaksananya pelayanan publik secara maksimal di mana waktu pelayanan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen terkadang masih terkendala kurang lancarnya koneksi dengan server Diskominfo sehingga mengakibatkan memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah dokumen.

**Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:**

1. Mempercepat waktu pelayanan terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan
2. Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana pelayanan online yang disediakan oleh Disdukpenkapil Kabupaten

**Upaya perbaikan :**

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti pemeliharaan sarana yang memadai sehingga apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.

**Tindak lanjut yang akan datang :**

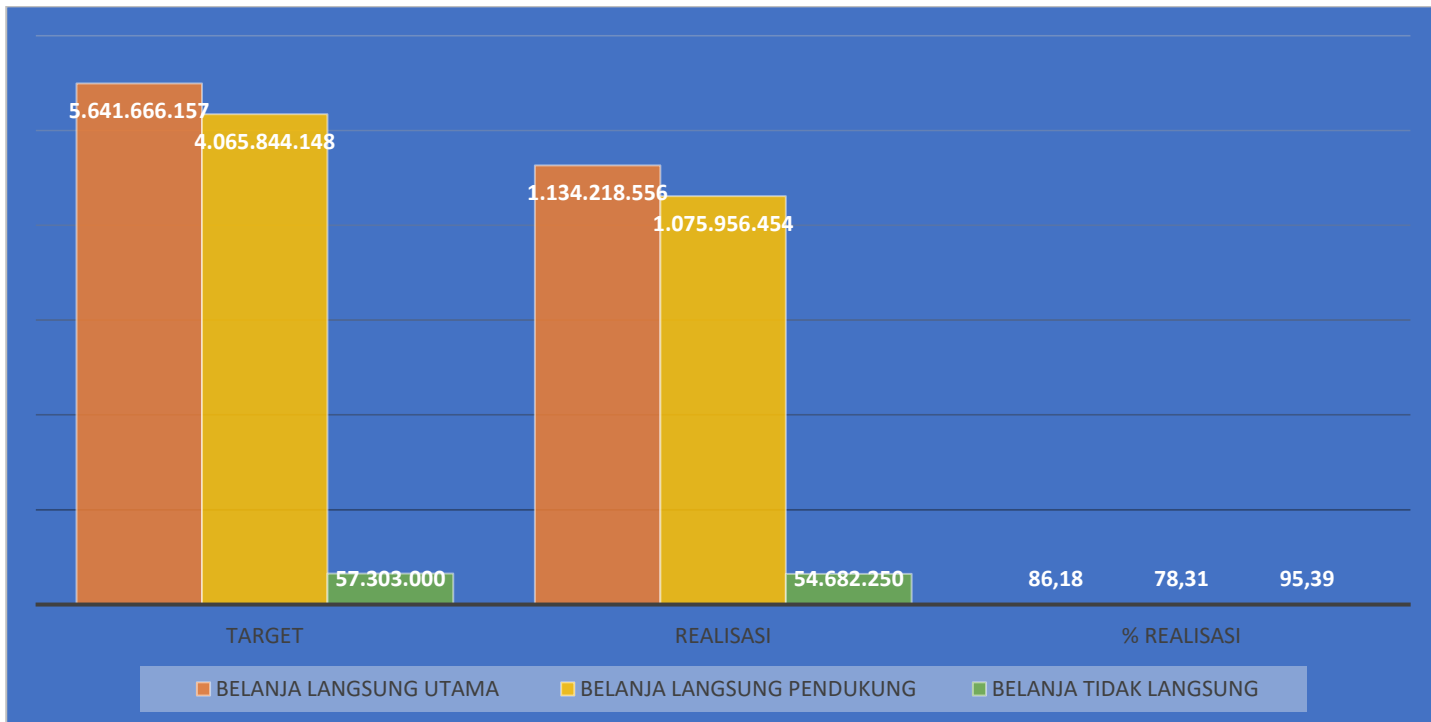
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Banjar sehingga ketika ada kerusakan dapat segera di perbaiki.
2. Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan agar apabila ada kendala dengan server masih bisa melakukan pelayanan secara online.

## **C. REALISASI ANGGARAN**

- D. Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Gambut tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.641.666.157,- dengan realisasi Anggaran Rp. 4.065.844.148,- (86,18%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung

(belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp. 4.507.447.601,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.529.887.694 (78,31%), untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa) dengan anggaran sebesar Rp. 1.134.218.556,- dengan realisasi sebesar Rp 1.075.956.454,- (94,86%) dan untuk belanja langsung (belanja modal) dengan anggaran sebesar Rp. 57.303.000,- dengan realisasi sebesar Rp 54.682.250,- (95,39%).

E.





**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	70.00	76.82	1.275.331.556	1.210.798.704	94,93
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Indeks	73.00	22.60	1.218.028.556	1.156.136.454	94,91
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100% Persen	100%	100%	2,500,000	2,459,000	98.36
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	6	270,000	267,000	98.89
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	75,000	57,000	76.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	75,000	72,500	96.67
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	450,000	447,000	99.33
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	450,000	445,500	99.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	450,000	440,000	97.78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	730,000	730,000	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% Persen	100%	100%	2,196,465,853	1,790,560,452	81.52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	4,423,627,601	3,449,707,694	77.98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	2	2	77,820,000	74,180,000	95.32
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100% Persen	100%	100%	9,195,000	9,195,000	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	195,000	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang	3	3	6,000,000	6,000,000	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100% persen	100%	100%	700,000	700,000	100.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan	1	1	700,000	700,000	100.00

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100% persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>64,807,400</b>	<b>61,435,780</b>	<b>94.80</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis	5	5	1,316,900	1,313,000	99.70
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	43	43	14,473,400	14,438,200	99.76
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jenis	7	7	1,825,800	1,825,600	99.99
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	12	12	3,441,300	2,885,220	83.84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	43,750,000	40,973,760	93.65
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>100% persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>48,884,000</b>	<b>46,900,000</b>	<b>95.94</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	unit	2	2	7,405,000	5,460,000	68.25
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7	41,479,000	41,440,000	99.90
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100% persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>224,055,256</b>	<b>206,252,291</b>	<b>92.05</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	5,460,000	5,460,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	12	61,015,256	52,331,003	85.76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	157,580,000	148,461,288	94.21
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</b>	<b>100% persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>85,726,000</b>	<b>85,535,000</b>	<b>99.77</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	9	62,716,000	62,620,000	99.84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jenis	2	2	11,010,000	10,915,000	99.13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	2	2	12,000,000	12,000,000	100.00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana</b>	<b>100% persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>19,162,800</b>	<b>17,326,500</b>	<b>90.41</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% persen	100%	100%	1,965,000	1,789,000	91.04
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	1,965,000	1,789,000	91.04
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17,197,800</b>	<b>15,537,500</b>	<b>90.34</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kegiatan	6	6	17,197,800	15,537,500	90.34

3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100% persen	100%	100%	76,985,000	61,675,000	80.11
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100% Persen	100%	100%	76,985,000	61,675,000	80.11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	2	2	9,275,000	9,275,000	100.00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kegiatan	3	3	67,710,000	52,400,000	77.38
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100% persen	100%	100%	14,940,000	13,800,000	92.36
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100% persen	100%	100%	9,970,000	8,830,000	100.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	4	4	5,000,000	5,000,000	100.00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	1	4,970,000	3,830,000	77.06
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	4,970,000	4,970,000	100.00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	kegiatan	2	2	4,970,000	4,970,000	100.00
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	96,010,000	96,010,000	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	96,010,000	96,010,000	100.00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kegiatan	1	1	35,000,000	35,000,000	100.00
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kegiatan	2	2	61,010,000	61,010,000	100.00

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	100%	26,570,000	22,340,000	84.07
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100% persen	100%	100%	26,570,000	22,340,000	84.07
	Fasilitasi Administasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	4,000,000	3,440,000	86.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	2	2	4,970,000	4,090,000	82.29
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1	1	1,995,000	1,995,000	100.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	1	1	2,985,000	2,465,000	82.57
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1	1	2,995,000	2,505,000	75.02
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dokumen	1	1	4,985,000	3,555,000	71.31
	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	dokumen	1	1	4,640,000	4,290,000	92.45
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA						1.275.331.556	1.210.798.704	94,93
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						1.218.028.556	1.156.136.454	94,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG						57.303.000	54.662.250	95.39

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.Gambut Thn.2022

### Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Gambut Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 90.50 dapat terealisasi 90,00 dengan nilai capaian 99,44% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 1.275.331.556,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.710.666.159,- dengan Persentase capaian 87,84 %.
2. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat target 90,50 realisasi 90,00 dengan nilai capaian 99,44 % sedangkan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan

target 71 belum mendapatkan realisasi dan persentase capaian kinerja karena sampai dengan disusunnya laporan ini Inspektorat belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua Indikator program tersebut dilaksanakan untuk menunjang Sasaran, didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 1.275.331.556,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.710.666.159,- dengan Persentase capaian 87,84 %.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan dengan target kinerja Laporan Administrasi Kepegawaian target 8 laporan realisasi 8 laporan, Laporan Penatausahaan Kantor target 12 laporan realisasi 12 laporan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor target 1 laporan realisasi 1 laporan, Laporan Pelayanan PATEN target 12 laporan realisasi 12 laporan, Laporan Barang Milik Daerah target 2 laporan realisasi 2 laporan, Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan target 10 Jenis laporan realisasi 10 Jenis laporan, Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp 626.943.175,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 465.295.838,- dengan Persentase capaian anggaran 74,21%.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan target kinerja 6 Jenis Laporan realisasi kinerja 6 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 31.018.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.362.000,- dengan Persentase capaian anggaran 78,53%.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 6 Jenis Laporan realisasi kinerja 6 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 38.780.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.380.000,- dengan Persentase capaian anggaran 75,75%.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 2 Jenis Laporan realisasi kinerja 2 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 18.064.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.440.000,- dengan Persentase capaian anggaran 91,00 %.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan realisasi kinerja 5 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 63.178.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.246.000,- dengan Persentase capaian anggaran 49,45 %.
8. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU) dengan target anggaran sebesar Rp 700.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100 %.
9. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa dengan target anggaran sebesar Rp 469.290.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 443.942.321,- dengan Persentase capaian anggaran 94,59 %.

---

### C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8  
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	100 %	74,21%	25,79 %
		Laporan Penatausahaan Kantor			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor			
		Laporan Pelayanan PATEN			
		Laporan Barang Milik Daerah			
		Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan			
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	78,53%	21,47%
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100 %	75,75%	24,25%
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	100 %	91,00 %	9,00%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	100 %	49,45 %	50,55 %
6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	0 %
7	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	terlaksananya pembinaan penyelenggara desa dengan capaian kinerja	100 %	94,59 %	5,41 %

## **D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**

### **D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2021**

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2021 memperoleh nilai 63,27 dengan interpretasi predikat B ( Baik ). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2022 direkomendasikan kepada Camat Gambut hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan Dokumen Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan turunannya, menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring target Jangka Menengah dalam Renstra secara periodik, dan menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran;
2. Pengukuran kinerja dapat dilakukan sampai ke individu staf, menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodic, hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan system reward dan punishment dan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
3. Laporan Kinerja untuk dapat mnyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat dijadikan dasar penilaian dalam pemberian reward dan punishment;
4. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi untuk menyajikan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dengan disertai bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti.



---

## D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Gambut telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
2. Mengukur kinerja staf dan melakukan monitoring kinerja secara periodik.
3. Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
4. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Gambut masuk dalam kategori **Berhasil** dengan target 90,50 dan realisasi 90,00 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 99,44% dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 5.698.969.157,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.660.506.398,- atau sebesar 81,78%

hal ini disebabkan antara lain :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk anggaran pemeliharaan sarana yang memadai perlu di tingkatkan agar apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
2. Masih terkendalanya jaringan internet di kecamatan Gambut sehingga pelayanan online belum bisa di manfaatkan secara maksimal
3. Belum adanya pelatihan ataupun bimbingan teknis oleh bidang Pemerintahan terhadap petugas Paten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang memperoleh nilai unsur pelayanan tertinggi adalah unsur Penanganan pengaduan, saran & masukan, biaya / tarif (4,00) sedangkan nilai unsur pelayanan terendah ada pada unsur perilaku pelaksana pelayanan (3,17).

## A. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan AKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Gambut tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Surat Inspektorat Kabupaten Banjar No. PW.01/86/P.Kin.As/IV/ITDA Tanggal 19 September 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gambut TA.2022
4. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022